PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-10/MK/2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

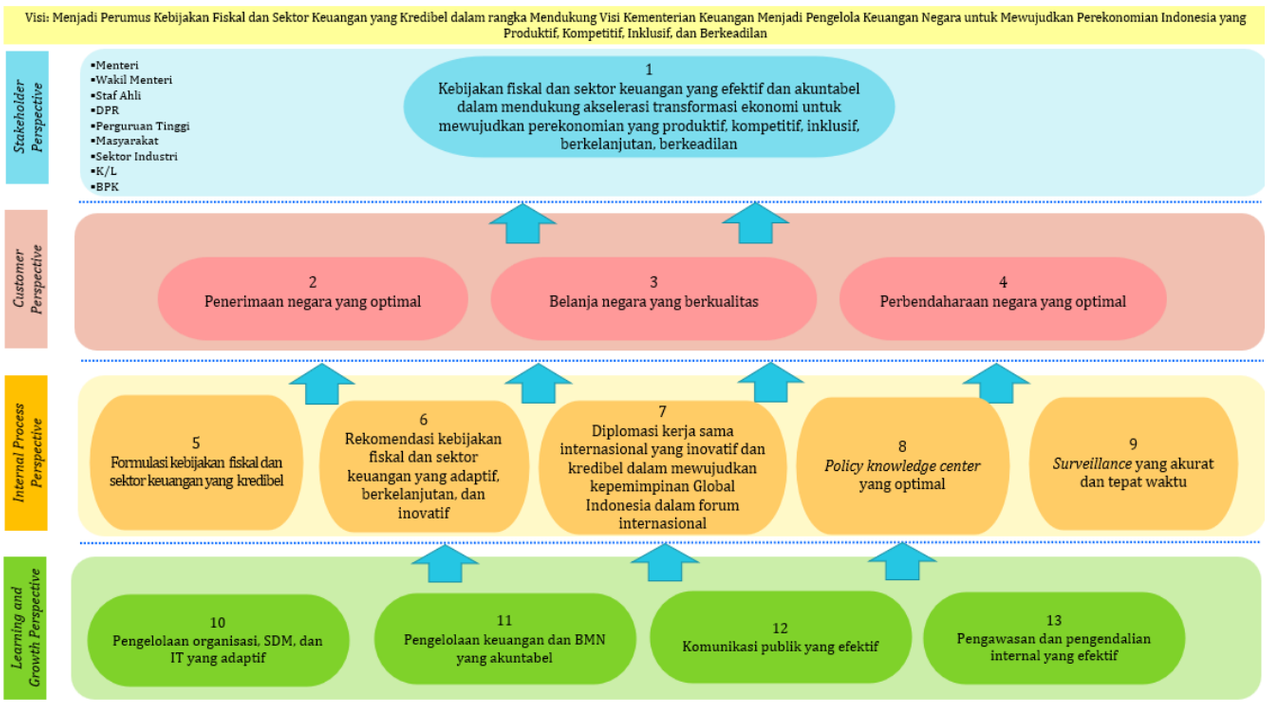

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, berkeadilan	1a-CP	Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional	100%
		1b-CP	Indeks integritas organisasi	100
		1c-N	Tingkat akurasi kebijakan makro fiskal pada KEM PPKF	85%
2.	Penerimaan negara yang optimal	2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100
3.	Belanja negara yang berkualitas	3a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85
		3b-CP	Indeks kualitas belanja BA BUN	100 (80-90)
4.	Perbendaharaan negara yang optimal	4a-CP	Indeks efektivitas kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	100
5.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel	5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	85
		5b-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat	85%
6.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif	6a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100
		6b-N	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	85
7.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan	7a-N	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95,5%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional	7b-N	Persentase usulan yang diadopsi dalam forum kerja sama FTA / CEPA	80%
8.	*Policy knowledge center* yang optimal	8a-N	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	100%
9.	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu	9a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%
		9b-N	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK	94%
10.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif	10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%
		10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100
11.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel	11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100
		11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10
12.	Komunikasi publik yang efektif	12a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100%
13.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	13a-CP	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)
		13b-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82

	Program/Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
	Program Kebijakan Fiskal	**Rp 29.791.025.000**
1.	Diplomasi dan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional	Rp 8.360.980.000
2.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 6.881.458.000
3.	Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	Rp 10.417.220.000
4.	Komunikasi dan Edukasi	Rp 4.131.367.000
	Program Dukungan Manajemen	**Rp 44.129.190.000**
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp 22.650.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 31.122.451.000

3.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	2.797.970.000
4.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	10.011.912.000
5.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	147.657.000
6.	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	26.550.000

Jakarta, 30 Januari 2024

Menteri Keuangan	Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Ditandatangani Secara Elektronik	Ditandatangani Secara Elektronik
Sri Mulyani Indrawati	Febrio Nathan Kacaribu

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, berkeadilan							
1a-CP	Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
1c-N	Tingkat Akurasi Kebijakan Makro Fiskal pada KEM PPKF	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
2	Penerimaan negara yang optimal							
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
3	Belanja negara yang berkualitas							
3a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
3b-CP	Indeks kualitas belanja BA BUN	-	-	-	-	-	100 (80-90	100 (80-90
4	Perbendaharaan negara yang optimal							
4a-CP	Indeks efektivitas kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	-	-	-	-	-	100	100
5	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel							

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5a-N	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85
5b-N	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO pusat	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
6	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif							
6a-CP	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	-	-	-	-	-	100	100
6b-N	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	10	20	20	40	40	85	85
7	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional							
7a-N	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	-	95,5%	95,5%	-	95,5%	95,5%	95,5%
7b-N	Persentase usulan yang diadopsi dalam forum kerja sama FTA / CEPA	-	80%	80%	-	80%	80%	80%
8	*Policy knowledge center* yang optimal							
8a-N	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu							
9a-N	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9b-N	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
10	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif							
10a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
10b-CP	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
11	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel							
11a-CP	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
11b-CP	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
12	Komunikasi publik yang efektif							
12a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
13	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif							
13a-CP	Indeks Maturitas SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
13b-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82

Kepala Badan Kebijakan Fiskal,

Ditandatangani Secara Elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	*Output/* Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase pelaksanaan kajian yang tepat waktu	Analisis Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang Tahun 2025 - 2045	Laporan kajian dan/atau rekomendasi kebijakan	Q1: Penyusunan rencana kerja	Q1: Rencana kegiatan	Januari s.d. Desember 2024	PKAPBN	1.000.000.000
				Q2: Pelaksanaan kajian	Q2: Pengumpulan data dan informasi			
				Q3: Pelaksanaan kajian	Q3: Analisis data dan informasi			
				Q4: Penyusunan rekomendasi dan finalisasi kajian	Q4: Laporan kajian			

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Ditandatangani Secara Elektronik

Febrio Nathan Kacaribu

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Febrio Nathan Kacaribu, SE, MIDEC, PhD	NAMA	Sri Mulyani Indrawati
NIP	197802272021211003	NIP	-
PANGKAT/ GOL RUANG	, _/_	PANGKAT/ GOL RUANG	-
JABATAN	Kepala Badan Kebijakan Fiskal	JABATAN	Menteri Keuangan
UNIT KERJA	Badan Kebijakan Fiskal	UNIT KERJA	Kementerian Keuangan

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, berkeadilan (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional	100%	Penerima Layanan
2.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, berkeadilan	Indeks integritas organisasi	100	Penerima Layanan

	(Penugasan dari Menteri Keuangan)			
3.	Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang efektif dan akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan, berkeadilan (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat akurasi kebijakan makro fiskal pada KEM PPKF	85%	Penerima Layanan
4.	Penerimaan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	100	Penerima Layanan
5.	Belanja negara yang berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	85	Penerima Layanan
6.	Belanja negara yang berkualitas (Penugasan dari Menteri Keuangan	Indeks kualitas belanja BA BUN	100 (80-90)	Penerima Layanan
7.	Perbendaharaan negara yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	100	Penerima Layanan
8.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai kinerja regulasi prioritas	85	Proses Bisnis
9.	Formulasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang kredibel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat	85%	Proses Bisnis

10.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	100	Proses Bisnis
11.	Rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	85	Proses Bisnis
12.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	95,5%	Proses Bisnis
13.	Diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan kredibel dalam mewujudkan kepemimpinan Global Indonesia dalam forum internasional (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase usulan yang diadopsi dalam forum kerja sama FTA / CEPA	80%	Proses Bisnis
14.	*Policy knowledge center* yang optimal (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	100%	Proses Bisnis
15.	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%	Proses Bisnis
16.	*Surveillance* yang akurat dan tepat waktu (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK	94%	Proses Bisnis

17.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	96%	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Nilai evaluasi organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	Penguatan Internal atau Anggaran
20.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	84,10	Penguatan Internal atau Anggaran
21.	Komunikasi publik yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
22.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	100 (4 skala 5)	Penguatan Internal atau Anggaran
23.	Pengawasan dan pengendalian internal yang efektif (Penugasan dari Menteri Keuangan)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap

PERILAKU KERJA		
		semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Febrio Nathan Kacaribu
197802272021211003

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Sri Mulyani Indrawati
-

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	528 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Tingkat efektivitas kerjasama keuangan internasional	-	-	-	-	-	100%	100%
2	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100
3	Tingkat akurasi kebijakan makro fiskal pada KEM PPKF	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
4	Indeks efektivitas kebijakan penerimaan negara	-	-	-	-	-	100	100
5	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85
6	Indeks kualitas belanja BA BUN	-	-	-	-	-	100 (80-90	100 (80-90
7	Indeks efektivitas kebijakan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	-	-	-	-	-	100	100
8	Nilai kinerja regulasi prioritas	-	40	40	60	60	85	85

9	Tingkat deviasi outlook makro ekonomi dan fiskal pada ALCO Pusat	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
10	Indeks penyelesaian kebijakan pendalaman pasar dan inklusi sektor keuangan	-	-	-	-	-	100	100
11	Indeks pengembangan kebijakan anggaran perubahan iklim di daerah	10	20	20	40	40	85	85
12	Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional	-	95,5%	95,5%	-	95,5%	95,5%	95,5%
13	Persentase usulan yang diadopsi dalam forum kerja sama FTA / CEPA	-	80%	80%	-	80%	80%	80%
14	Persentase pengelolaan *Knowledge Management System* yang optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	Persentase laporan perkembangan ekonomi keuangan dan APBN yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	Persentase Penyelesaian IS Program RBTK	23%	46%	46%	69%	69%	94%	94%
17	Tingkat kualitas pengelolaan SDM	60%	60%	60%	60%	60%	96%	96%
18	Nilai evaluasi organisasi	-	-	-	-	-	100	100
19	Indeks kualitas pengelolaan keuangan BA 15	100	100	100	100	100	100	100
20	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	84,10	84,10
21	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
22	Indeks Maturitas Penyelenggaraan SPIP	-	-	-	-	-	100 (4 skala 5)	100 (4 skala 5)
23	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*

2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,	Pejabat Penilai Kinerja,
Ditandatangani secara elektronik	Ditandatangani secara elektronik
Febrio Nathan Kacaribu	Sri Mulyani Indrawati
197802272021211003	-